



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI

Jln Raya Puputan-Komplek Nitimandala
Denpasar Bali (80235)

Telp. (0361) 223096 Fax. (0361) 223095

Website : www.disperindag.baliprov.go.id/

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Denpasar, 31 Desember 2019
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI,



Ir. I PUTU ASTAWA, MMA

Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 198302 1 055

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas Industri, dengan indikator kinerja :
Indeks peningkatan produksi, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 3,5 % atau sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target.
- b. Sasaran 2 : Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok dengan indikator kinerja:
Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 3,86 % atau sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Ekspor, dengan indikator kinerja :

1. Peningkatan Nilai Ekspor. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah -39,85% dengan nilai ekspor US\$ 504.937.268,72.
2. Jumlah Barang yang Tersertifikasi. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 adalah 85 pengujian atau sebesar 151,78%
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, dengan indikator kinerja: Indeks Keberdayaan Konsumen. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 2% atau sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target.
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Komoditi Olahan pangan , dengan indikator : Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang Tumbuh dan Berkembang. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 5 produk olahan atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target.

Selain pencapaian sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali juga ditunjukkan oleh pencapaian target Pelaksanaan Program Pendukung.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali ke depan. **Pertama**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya Produktifitas Industri antara lain semakin banyaknya produk-produk kerajinan Bali yang mudah ditiru dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih murah serta cepatnya perubahan selera pasar. **Kedua**, tantangan yang dihadapi dalam Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok antara lain melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok tertentu terutama pada hari raya, hari libur,serta terjadinya anomali cuaca yang

menyebabkan terganggunya ketersediaan bahan pokok. **Ketiga**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya Ekspor antara lain banyaknya muncul negara-negara pesaing dengan jenis produk sama, kualitas lebih bagus dan harga lebih murah serta keterbatasan kemampuan eksportir memanfaatkan paket kebijakan ekspor. **Keempat**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen antara lain masih banyaknya barang-barang beredar tidak sesuai ketentuan/standar/SNI. **Kelima**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya Komoditi Olahan pangan antara lain masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha terkait mutu produk.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Keadaan Pegawai	4
1.4 Sarana dan Prasarana	6
1.5 Isu-Isu Strategi.....	7
1.6 Keuangan.....	8
1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategik.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	26
3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019	34
3.3 Aspek Keuangan.....	64
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Data Pegawai Disdagperin Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.2 Data Pegawai Disdagperin Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.3 Data sarana dan prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.....	6
Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	23
Tabel 3.1 Sasaran Strategis 1	33
Tabel 3.2 Sasaran Strategis 2	43
Tabel 3.3 Pasar Tradisional Yang Telah Dilakukan Pembinaan Dan Penataan Tahun 2017	46
Tabel 3.4 Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali.....	49
Tabel 3.5 Data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali.....	50
Tabel 3.6 Sasaran Strategis 3	52
Tabel 3.7 Perkembangan Ekspor Provinsi Bali Dari Tahun 2014 – 2018.....	53
Tabel 3.8 Pameran Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.....	55
Tabel 3.9 Sasaran Strategis 4	57
Tabel 3.10 Produk SNI Yang Telah Dilakukan Pengawasan	59
Tabel 3.11 Pengawasan terhadap Barang yang beredar yang dilengkapi dengan Manual Kartu Garansi.....	60
Tabel 3.12 Sasaran Strategis 5	63
Tabel 3.13 Data Pelaku Usaha Industri yang Telah di Fasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui kuota klinik HKI Kemenperin	64

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali	65
--	----

DAFTAR GRAFIK**HALAMAN**

Tabel 3.1	Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019	35
Tabel 3.2	Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019	36
Tabel 3.3	Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Sektor Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019	37
Tabel 3.4	Perkembangan Nilai Produksi Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019	38
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019.....	39
Tabel 3.6	Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri dan Kerajinan Terhadap total ekspor non Migas Bali	40

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.
2. Mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sekretaris
 - Subag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Subag Keuangan
- c. Bidang Perindustrian
 - Seksi Perencanaan Industri
 - Seksi Pengembangan Industri
 - Seksi Pengawasan Industri
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
 - Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting
 - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - Seksi Pengembangan ekspor
 - Seksi Fasilitas Ekspor Impor
 - Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor

f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

- Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
- Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen
- Seksi Tertib Niaga

Susunan Organisasi UPT di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut ini :

a. UPT Industri Olahan Pangan Kemasan

- Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pengembangan Pengelolaan Pangan dan Kemasan
- Kelompok Jabatan Fungsional

b. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

- Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium
- Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Keadaan Pegawai

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali didukung 77 pegawai. Berdasarkan Golongan Pegawai Negeri Sipil pada Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali terdiri dari :

Tabel 1.1
Data Pegawai Disdagperin Berdasarkan Golongan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
		(orang)
1	Golongan IV	22
2	Golongan III	50
3	Golongan II	5
	Jumlah	77

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Disdagperin Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		(orang)	(%)
1	Pasca Sarjana (S2)	23	29,87
2	Sarjana (S1)	30	39,96
3	SLTA	22	28,57
4	SMP	1	1,29
5	SD	1	1,29
	Jumlah	77	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2018

1.4 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan didukung sarana dan prasarana berupa :

Tabel 1.3
Data sarana dan prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Bali

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gedung	3 unit
2.	Kendaraan roda empat	10 unit
3.	Kendaraan roda dua	14 unit
4.	Website	1 unit
5.	Laboratorium	1 unit

Untuk mendukung komunikasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan stakeholder dan juga dalam rangka melaksanakan tugas terkait dengan informasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali memiliki website dinas dengan alamat: <http://www.disdagperin.baliprov.go.id/>. Sarana dan prasarana yang ada dipergunakan seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun sarana yang ada belum mencukupi dalam melaksanakan tugas, termasuk juga peralatan laboratorium yang kurang memadai dalam melakukan pelayanan pengujian. Sarana dan prasarana kerja masing-masing bidang/seksi/subbagian/ seperti Komputer/Laptop masih belum memadai seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang terkini sehingga menyebabkan kinerja aparatur menjadi kurang optimal. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu adanya penambahan sarana dan prasarana peralatan kantor yang mengarah ke perkantoran modern

berbasis Teknologi Informasi (TI). Di samping itu dirasakan keterbatasan juga terhadap bahan pustaka, meubelair dan komputer untuk pelayanan informasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.

1.5 Isu-Isu Strategis

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal. Permasalahan pembangunan pada bidang ekonomi yang meliputi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

- a. Perdagangan
 - 1) Akses pasar dan jaringan masih lemah;
 - 2) Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung;
 - 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 - 4) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
 - 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
 - 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
- b. Perindustrian
 - 1) Daya saing produk Industri Bali masih lemah;

- 2) Keterbatasan bahan baku industri ;
- 3) Sistem pengembangan Industri belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
- 5) Kemampuan informasi teknologi industri masih lemah.

Dalam penjabarannya sesuai dengan tugas pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka dilakukan analisis Isu-Isu Strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor Industri dan Perdagangan dari tahun 2018 – 2023.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali antara lain:

1. Masih rendahnya pemasaran produk lokal;
2. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan bahan pokok;
3. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di provinsi Bali;
4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen;
5. Masih lemahnya daya saing produk industri Bali.

1.6 Keuangan

Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta kewenangan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai oleh APBD, APBN. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali juga memiliki kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6.1 Sumber Dana APBD

Pagu Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dari sumber dana APBD tahun 2019 baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.19.046.176.095,- dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan 9,93 %. Adapun realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 77,20%, apabila dibandingkan tahun 2018.

1.6.2 Sumber Dana APBN

Pagu Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dari sumber dana APBN sebesar Rp. 4.411.825.000,- dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan 2,27%. Adapun realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 89,34%, apabila dibandingkan tahun 2018.

1.6.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2019 :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp.)	(%.)
1	2	3	4	5
	Pendapatan	26.000.000,00	38.300.000,00	147,30
1.	Pendapatan Asli Daerah	26.000.000,00	38.300.000,00	147,30

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF memuat :

- a. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
- b. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, melalui proses suatu rencana yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

A. Visi

Pemerintah Provinsi Bali 2018 – 2023 dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki *Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”*.

Dalam Mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan

sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara konprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.

11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung

pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menentukan cita-cita dan citra yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan panjang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali mendukung 3 misi :

1. Misi 1 : Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Misi 16 : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.

3. Misi 17 : Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

B. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan merupakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali, maka dapat dikemukakan tujuan sektor industri dan perdagangan tahun 2018-2019, yaitu:

- a. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal
- b. Meningkatnya kualitas IKM branding Bali berorientasi ekspor

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk masing-masing tujuan di atas ditetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas Industri

Sasaran 2 : Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok

Sasaran 3 : Meningkatnya Ekspor

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen

Sasaran 5 : Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan

3. Strategi dan Kebijakan

3.1 Strategi

Sejalan dengan upaya mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu Bali yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945, maka strategi pengembangan industri dan perdagangan, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan Kompetensi Inti Daerahnya masing-masing. Peningkatan keterampilan para pengrajin melalui pelatihan dan magang. Selain itu pula menggunakan sistem kluster dan fokus pada satu desa satu produk (OVOP).
2. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku industri kerajinan. Memfasilitasi adanya kerjasama dengan daerah lain sebagai penghasil bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengrajin.

3. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri, menyarankan agar para pengusaha/pengrajin mau dan dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG) sehingga terwujud efisiensi produksi.
4. Mengupayakan bantuan tenaga ahli teknik dan desain untuk diversifikasi produk. Memfasilitasi agar para pengrajin mendapat bantuan tenaga yang ahli dibidang teknik dan desain produk kerajinan, sehingga mampu menghasilkan inovasi produk dengan desain yang memenuhi selera pasar dan dapat bersaing dipasar global.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melakukan sosialisasi dan bimbingan melalui pembentukan klinik HKI.
6. Melakukan fasilitasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok industri kreatif, meliputi 15 sub sektor yaitu periklanan, arsitektur, animasi, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi & radio, riset dan pengembangan.
7. Memfasilitasi peningkatan promosi maupun pemasaran. Mengupayakan agar para produsen/pedagang dapat mempromosikan sekaligus menjual produknya di beberapa daerah di Indonesia, serta di beberapa negara lain yang dipandang potensial sebagai pangsa pasar ekspor. Selain itu sebaiknya Provinsi Bali mempunyai fasilitas tempat pameran bertaraf internasional sehingga para pengusaha dapat melakukan pameran/promosi di Bali dan tidak harus berpameran di daerah lain atau negara lain. Bahkan daerah lainpun dapat berpameran di Bali , hal ini disebabkan nama Bali yang sudah terkenal di tingkat nasional dan internasional, dimana Bali dapat menjadi market point.

Dengan terbangunnya fasilitas pameran bertaraf internasional, pameran/promosi dapat ditingkatkan jumlah pesertanya maupun intensitas pelaksanaannya dengan biaya yang lebih ringan, dapat pula pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi selera pasar juga dapat direncanakan untuk membangun sebuah design centre sebagai tempat pengembangan design yang mengikuti selera pasar.

8. Memfasilitasi Peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan
Mengupayakan peningkatan perlindungan konsumen, dan memperkuat sistem pengawasan barang dan jasa. Pelaksanaannya dilakukan melalui program perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama barang-barang yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, lingkungan (K3L), tertib usaha, dan tertib ukur. Mengupayakan adanya integritas pasar yang baik, tertib, teratur, dipercaya dan pembentukan harga yang transparan merupakan salah satu cerminan terhadap tingkat efektivitas mekanisme pasar. Lancarnya distribusi barang, tersedianya stock secara berkesinambungan serta tidak adanya beban distribusi yang tidak resmi dan berlebihan merupakan wujud dari mekanisme perdagangan yang efisien.
9. Memfasilitasi pengembangan ekspor. Selain komoditi kerajinan yang sangat potensial sebagai komoditi ekspor, di Bali juga diupayakan pengembangan komoditi agro, mengingat pangsa pasar yang cukup banyak, dan lahan pertanian cukup subur.
10. Melakukan pembinaan kepada para eksportir maupun calon eksportir dalam rangka peningkatan SDM.

11. Mengupayakan peningkatan pelayanan informasi.
12. Menyediakan dan memberikan berbagai informasi mengenai kebijakan maupun teknis pelaksanaan berkenaan dengan sektor industri dan perdagangan, bagi masyarakat, lembaga/ instansi yang membutuhkan.
13. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada pelaku usaha baik importir maupun eksportir.
14. Peningkatan peran kelembagaan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada eksportir dan importir.
15. Pembinaan untuk peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
16. Peningkatan akses pasar ke negara-negara target ekspor melalui promosi.
17. Melakukan pengembangan pasar dengan pengamatan terhadap pasar potensial, segmen pasar, pemasok dan pesaing.
18. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan *Stakeholders* dalam rangka masukan untuk kerjasama perdagangan internasional.

3.2 Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mencapai keberhasilan perlu ditetapkan kebijakan yang ditempuh melalui sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait guna menentukan kebijakan.

Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali adalah :

1. Mengembangkan Industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.

2. Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan informasi industri.
4. Menetapkan target ekspor Daerah, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitasi pelayanan publik, memanfaatkan hasil kerjasama perdagangan internasional, mendorong para pengusaha untuk menjadi eksportir dan meningkatkan partisipasi pengusaha Bali dalam jaringan global dan promosi
5. Menjaga ketersediaan dan distribusi serta stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting
6. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan perlindungan konsumen.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai melalui dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali No.918/026/DPA/2019, tanggal 31 Desember 2018, adapun perjanjian kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan utama (yang menunjukkan *core bussines* SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Tahunan	Anggaran (Rp.)	
					APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkannya Produktifitas Industri	Indeks Peningkatan Produksi	Program Pengembangan Industri	3,5%	3.528.933.052	
			Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Provinsi Bali			2.084.300.000
2.	Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok	Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok	Program Peningkatan efisiensi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	<10%	143.288.000	
			Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri			1.712.402.000
3.	Meningkatnya Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	2%	478.146.102	
			Program peningkatan perdagangan luar negeri			615.123.000
		Jumlah Barang yang Tersertifikasi	Program Pengembangan Pelayanan Penguji Mutu Barang	56	150.000.000	
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	2%	195.000.000	

5.	Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan	Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang Tumbuh dan Berkembang	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	5	100.000.000	
Total					4.595.367.154	4.514.702.000

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, program yang dilaksanakan pada Tahun 2019 yaitu :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.044.875.808	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2019 yang telah disepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja, dilakukan pengumpulan data kinerja yang hasilnya dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali mempunyai lima sasaran utama dalam meningkatkan kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi dari perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali merupakan proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja perangkat daerah. Adapun lima sasaran yang dimaksud antara lain :

SASARAN 1 : Meningkatkannya Produktifitas Industri							
Indikator Kinerja	Target Th.2019	Realisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Indeks Peningkatan Produksi	3,5 %					3,5 %	100%
Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Kecil Menengah Terhadap Total Ekspor Non Migas	-	74,86%	61.01%	51,04%	-		-
Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Terhadap Total Ekspor Non Migas	-				51,86%		
Persentase Peningkatan Kepemilikan Sertifikat Kekayaan Intelektual oleh IKM	-				6,3%		

Jumlah Industri yang memiliki HKI dan Kemasan Memenuhi Standar <i>*Target baru th 2017</i>	-	-	-	70 Industri	-		-
---	---	---	---	-------------	---	--	---

Pada sasaran 1 Meningkatnya Produktifitas Industri ditetapkan satu indikator kinerja yaitu :

- Indeks peningkatan produksi (dengan target 3,5%). Target Indikator tersebut dapat di hitung dengan cara = $(\text{Nilai produksi industri tahun } n - \text{nilai produksi industri tahun } n-1 / \text{nilai produksi industri tahun } n-1 \times 100\%)$.
- Persentase Peningkatan Kepemilikan Sertifikat Kekayaan Intelektual oleh IKM pada tahun 2018 dengan target sebesar 4,25% dan terealisasi sebesar 6,3%.
- Setelah adanya perubahan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka indikator meningkatnya daya saing industri yang pada tahun 2017 adalah industri kecil menjadi industri. .
Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Terhadap Total Ekspor Non Migas (dengan target sebesar 35%). Target Indikator tersebut dapat di hitung dengan cara = $(\text{Nilai Ekspor Industri} : \text{Total Ekspor Non Migas Bali}) \times 100\%$. Sedangkan 4 (empat) tahun sebelumnya (2014-2017) indikator Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Kecil Menengah Terhadap Total Ekspor Non Migas dengan capaian indikator telah melampaui target 100%.
- Pada tahun 2017 indikator meningkatnya daya saing industri adalah Jumlah industri yang memiliki HKI dan kemasan yang memenuhi standar (dengan capaian target sebesar 140%).

SASARAN 2 Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok							
Indikator Kinerja	Target Th.2019	Realisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase Perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	<10%	3,31%	3,23%	3,32%	-	3,86%	100%
Persentase Peningkatan Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Pokok	-				4,6%	-	
Persentase Revitalisasi Pasar Tradisional	-	9%	9%	82,08%	-	-	-
<i>*Target Baru tahun 2015</i>							

Indikator kinerja sasaran terjaganya harga kebutuhan bahan pokok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahun 2019 Persentase Perkembangan harga kebutuhan bahan pokok pangan terealisasi sebesar 3,86%, yang berarti capaian targetnya 100% karena realisasi kenaikan harga <10%. Hal ini berarti persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok pangan dapat terjaga stabilitasnya. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan bahan pokok tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pada lampiran 1. Selain itu juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali merupakan anggota tim pengendalian inflasi daerah.

- b. Tahun 2018 Persentase Peningkatan Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Pokok terealisasi sebesar 4,6%, yang berarti capaian targetnya 100% karena realisasi kenaikan harga <15%.
- c. Tahun 2015-2017 indikator Meningkatnya Efektifitas Perdagangan Dalam Negeri selain Persentase Perkembangan harga kebutuhan bahan pokok, juga Persentase Revitalisasi Pasar Tradisional. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali menetapkan target sebesar 41% dari 106 pasar untuk direvitalisasi dari sudut pengelolaan manajemen pasar, dengan capaian kinerja telah mencapai 100%.

SASARAN 3 Meningkatnya Ekspor							
Indikator Kinerja	Target Th.2019	Realisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	2%				23,54%	-39,85%	-19%
Persentase Peningkatan nilai ekspor perdagangan Bali	-	-4,45%	19,29%	18,34%	-		-
Persentase Peningkatan jumlah Eksportir Baru	-	10%	6,81%	9,84%	-		-
Jumlah Penerbitan SKA					37.315 SKA		

Pada sasaran 3 yaitu Meningkatnya Ekspor Daerah ditetapkan 2 indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2019 indikator kinerja sasaran meningkatnya ekspor daerah adalah Persentase Peningkatan nilai ekspor dengan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 19% atau nilai ekspor US\$ 504.937.268,72. Perhitungan persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan Bali di peroleh

dari = ((nilai ekspor perdagangan Bali tahun ke n – nilai ekspor perdagangan bali tahun ke n-1) dibagi nilai ekspor perdagangan bali tahun ke n-1) x 100%.

- b. Jumlah Penerbitan SKA pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 37.315 SKA
- c. Tahun 2015-2017 indikator meningkatnya ekspor daerah adalah Persentase Peningkatan nilai ekspor perdagangan Bali dan Persentase Peningkatan jumlah Eksportir Baru dengan capaian kinerja 100%. Perhitungan persentase peningkatan jumlah Eksportir Baru di peroleh dari = ((jumlah Eksportir Baru tahun ke n – jumlah Eksportir Baru tahun ke n-1) dibagi jumlah Eksportir Baru tahun ke n-1) x 100%.

SASARAN 4							
Meningkatnya Perlindungan Konsumen							
Indikator Kinerja	Target Th.2019	Ralisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Indeks Keberdayaan Konsumen	2%					2%	100%
Persentase produk ber SNI yang beredar yang diawasi	-	7,64%	6.44%	9.16%	-		
Persentase Peningkatan Produk ber SNI yang beredar yang diawasi	-				12%		

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Indeks Keberdayaan Konsumen pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2% dan telah terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen diukur melalui indikator kinerja Indeks Keberdayaan Konsumen yaitu ((Indeks Keberdayaan Konsumen tahun (n) – Indeks

Keberdayaan Konsumen tahun (n-1)/ Indeks Keberdayaan Konsumen tahun (n-1)) sehingga diperoleh hasil 31,42 untuk tahun 2019.

- b. Persentase Peningkatan Produk ber SNI yang beredar yang diawasi pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 12% dan telah terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Meningkatnya Perlindungan Konsumen diukur melalui indikator kinerja Persentase produk ber SNI yang beredar yang diawasi yaitu = ((produk yg ditetapkan SNI wajib-produk yang belum diawasi) dibagi produk yang ditetapkan SNI wajib) x 100%.
- c. Tahun 2015-2016 persentase produk ber SNI yang beredar yang diawasi target 7% capaian kinerjanya rata-rata belum mencapai 100%. Sedangkan tahun 2017 capaian kinerjanya telah melampaui target sebesar 130,86%.
- d. Tahun 2015 persentase peroduk ber SNI yang beredar capaiannya 7,64% dari target 7%.

SASARAN 5 Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan							
Indikator Kinerja	Target Th.2019	Ralisasi Capaian					Capaian (%) 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah Komoditi Olahan pangan yang Tumbuh dan Berkembang	5	-	-	-	-	5	100%

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah Komoditi Olahan pangan yang Tumbuh dan Berkembang ditargetkan sebanyak 5 produk olahan dan telah terealisasi dengan capaian kinerja 100%.

Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan diukur melalui indikator kinerja Jumlah dari komoditi olahan pangan yang tumbuh dan berkembang.

3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2018 – 2023, terdapat 5 (lima) sasaran strategis, adapun analisa dari kelima sasaran strategis untuk mencapai tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, akan diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis Satu

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Produktifitas Industri

Untuk meningkatkan produktifitas industri tahun 2019 dapat diukur dari Indeks Peningkatan Nilai Produksi yaitu ($\text{Nilai Produksi Industri tahun } n - \text{Nilai produksi industri tahun } n-1 \text{ dibagi Nilai produksi industri tahun } n-1 \times 100\%$).

Pada tahun 2019 capaian kinerja diukur dengan Indeks Peningkatan Nilai Produksi. Tahun 2015-2016 indikator kinerja sasaran strategis 1 meningkatnya daya saing industri Bali dapat diukur dari Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Kecil Menengah Terhadap Total Ekspor Non Migas. Untuk tahun 2018 capaian kinerja diukur dengan Jumlah Industri yang memiliki HKI dan Kemasan Memenuhi Standar dan Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Kecil Menengah Terhadap Total Ekspor Non Migas.

Tabel 3.1
Sasaran Strategis 1
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

Indikator Kinerja	Target Th.2019	Realisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Indeks Peningkatan Produksi	3,5%					3,5%	100 %
Jumlah Industri yang memiliki HKI dan Kemasan Memenuhi Standar <i>*Target baru th 2017</i>	-	-	-	70 Industri	-	-	-
Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Kecil Menengah Terhadap Total Ekspor Non Migas	-	74,86%	61,01%	51,04%		-	-
Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Terhadap Total Ekspor Non Migas	-				51,86%		
Persentase Peningkatan Kepemilikan Sertifikat Kekayaan Intelektual oleh IKM	-				6,3%		
Jumlah HKI yang didaftarkan					15	25	

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi

Industri

Berbagai tantangan/ permasalahan yang dihadapi daya saing industri Bali antara lain: keterbatasan bahan baku, penguasaan teknologi masih kurang, permintaan/ selera pasar yang cepat berubah, masuknya produk yang sejenis dengan harga dan mutu yang lebih bagus, kurangnya inovasi/kreatifitas, masih masihih banyaknya pelaku usaha kurang menyadari akan pentingnya melindungi hasil karya, kemasan produk-produk yang dihasilkan industri Provinsi Bali masih banyak yang kurang menarik/sesuai standar, tuntutan sertifikasi produk, serta masih rendahnya kemampuan SDM memanfaatkan teknologi dalam berproduksi maupun pemasaran. Selain itu masih lemahnya permodalan serta persaingan dunia global yang semakin tajam.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut antara lain: kerjasama bahan baku dengan daerah penghasil, pelatihan teknik produksi, memfasilitasi HKI, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM baik produk maupun kemasannya, memfasilitasi sertifikasi, memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan-pelatihan berbasis IT dan memfasilitasi pemasaran. Sehingga dapat meningkatkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja industri Provinsi Bali serta nilai ekspor produk-produk industri dapat juga dijadikan indikasi bahwa industri Bali mempunyai daya saing/produktifitasnya meningkat. Berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Bali baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, sebagai berikut :

a. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali Pada Tahun 2015 – 2019

Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk perkembangan Jumlah Unit Usaha dari tahun 2018 sebanyak 15.216 Unit Usaha meningkat Menjadi 15.884 Unit Usaha pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali
pada Tahun 2015 – 2019



Dengan meningkatnya Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali setiap tahunnya, menandakan bahwa produktifitas Industri di Bali sudah mulai membaik.

b. Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali Pada Tahun 2015 – 2019

Tenaga kerja Sektor Industri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam sektor industri guna menghasilkan Produk untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Bali tahun 2018 sebanyak 104.193 orang meningkat menjadi 104.417 orang pada tahun 2019.

Grafik 3.2
Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali
pada Tahun 2015 – 2019

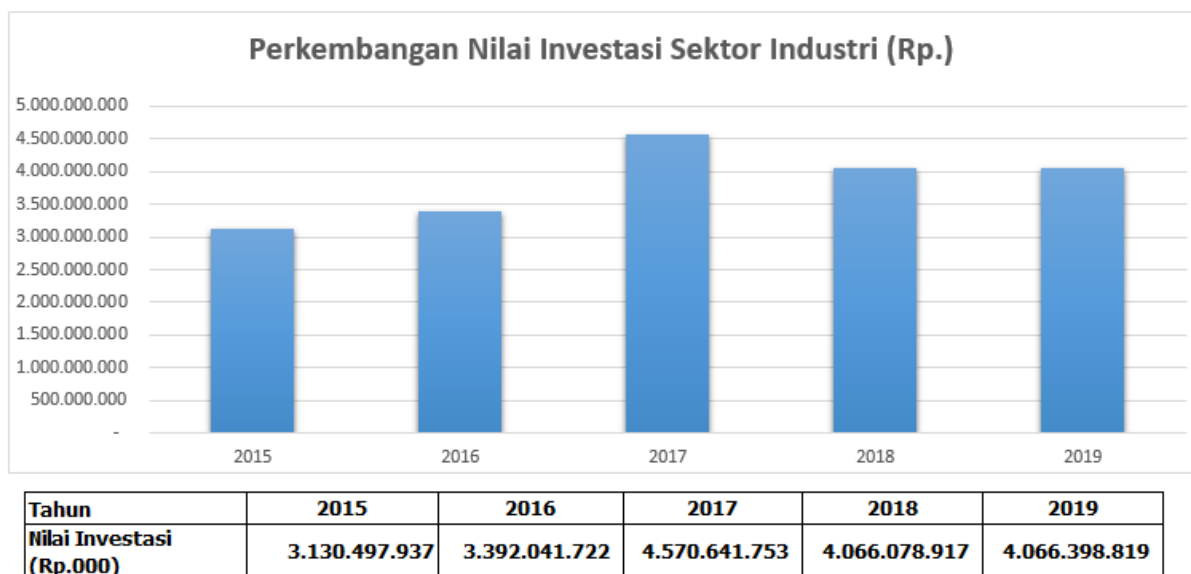


Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Bali mengalami peningkatan tiap tahunnya.

c. Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Sektor Industri Bali Pada Tahun 2015 – 2019

Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. Perkembangan Nilai Investasi Industri Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh jumlah produksi. Untuk perkembangan Nilai Investasi dari tahun 2018 sebanyak Rp.4.066.078.917.000 meningkat menjadi Rp.4.066.398.819.000 pada tahun 2019.

Grafik 3.3
Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Sektor Industri Bali
pada Tahun 2015 – 2019

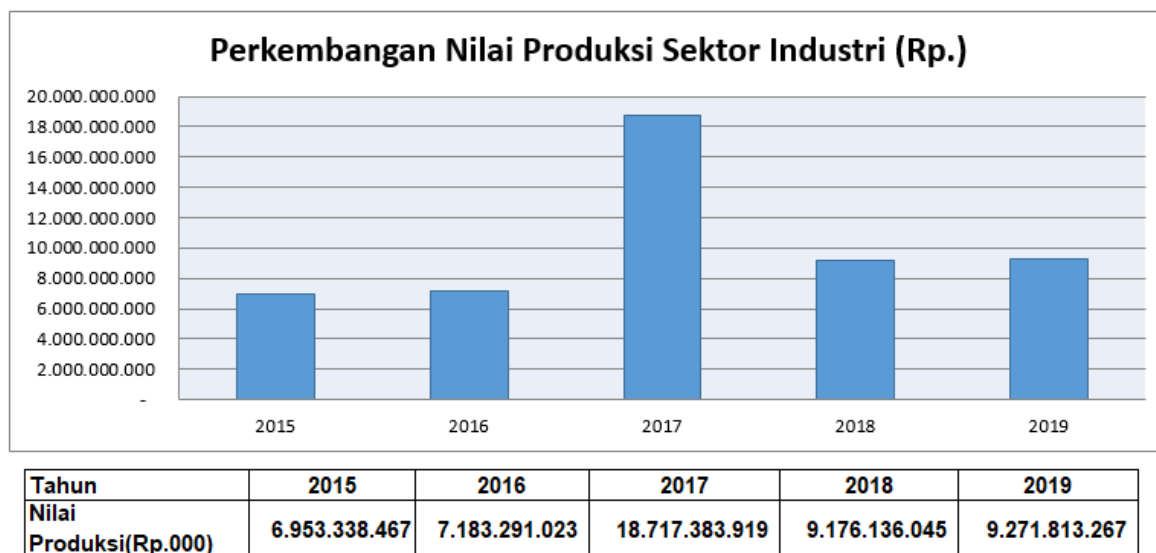


d. Perkembangan Nilai Produksi Industri Bali Pada Tahun 2015 – 2019

Perkembangan Nilai Produksi Industri Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh permintaan pasar dan

investasi. Untuk perkembangan Jumlah Nilai Produksi dari tahun 2018 sebanyak Rp.9.176.136.045.000 meningkat menjadi Rp. 9.271.813.267.000 pada tahun 2019.

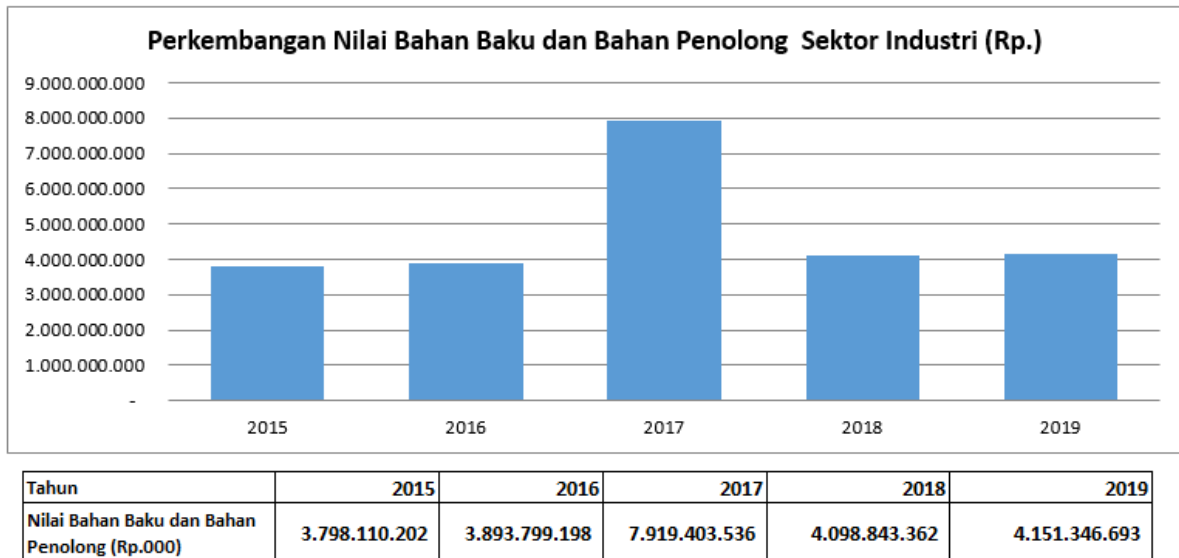
Grafik 3.4
Perkembangan Nilai Produksi Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019



e. Perkembangan Nilai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Bali
Pada Tahun 2015 – 2019

Perkembangan Nilai Bahan Baku dan Bahan Penolong dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk industri mengalami fluktuasi, antara lain dipengaruhi oleh nilai produksi. Untuk perkembangan Nilai Bahan Baku dan Bahan Penolong pada tahun 2018 sebanyak Rp. 4.098.843.362.000 meningkat menjadi Rp. 4.151.346.693.000 pada tahun 2019. Perkembangan nilai bahan baku dan bahan penolong industri Bali pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

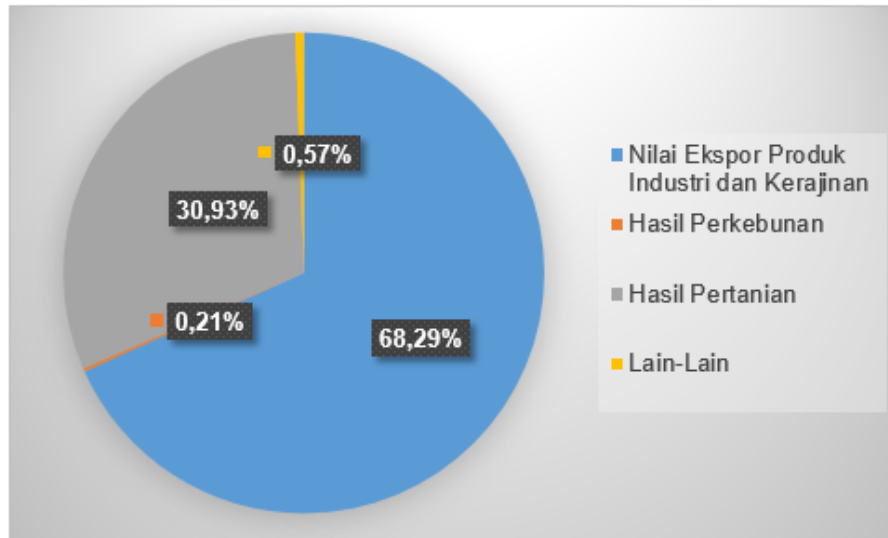
Grafik 3.5
Perkembangan Nilai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Bali pada Tahun 2015 – 2019



3.2.1.2 Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Terhadap Total Ekspor Non Migas

Produk Industri dan Kerajinan sangat mendominasi kinerja ekspor non migas Provinsi Bali dengan mencatatkan nilai ekspor hingga September tahun 2019 sebesar US\$. 258,604,956.04, dibandingkan dengan total ekspor Provinsi Bali pada tahun 2019 yang nilainya mencapai US\$.378.702.951,53. Dengan demikian Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri dan Kerajinan Terhadap total ekspor non Migas Bali mencapai 51,86 persen. Adapun komoditi industri dan kerajinan terhadap total ekspor nonmigas Bali dan realisasinya pada tahun 2019 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Grafik 3.6
Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri dan Kerajinan Terhadap total ekspor non Migas Bali



Nilai Ekspor Produk Industri dan Kerajinan	258.604.956,04
Hasil Perkebunan	795.797,66
Hasil Pertanian	117.135.254,66
Lain-Lain	2.166.943,17

Ket. : sampai dengan September 2019 (berdasarkan SKA yang diterbitkan)

3.2.1.3 Persentase Peningkatan Kepemilikan Sertifikat Kekayaan Intelektual

Pentingnya HKI tidak semata-mata untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas hasil karya pencipta/pembuat/pemilik. HKI dapat digunakan/dipakai/dimanfaatkan oleh penciptanya sendiri atau pemiliknya serta dapat juga dilisensikan atau diwariskan kepada pihak lain dengan cara yang di atur oleh undang-undang. Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan dan tercatat, oleh pemiliknya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan memperoleh hasil dari HKI itu sendiri salah satunya dengan cara melisensikan. Lisensi dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemilik Kekayaan Intelektual terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan, memakai (bukan pengalihan). Kepemilikan Sertifikat Kekayaan

Intelektual yang didaftarkan pada tahun 2019 antara lain : 3 jenis HKI indikasi geografis, 8 Hak Cipta, 11 merek, dan 3 desain industri. Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi dan memfasilitasi industri di Bali untuk mendapatkan HKI.

3.2.2 Sasaran Strategis Dua

Sasaran Strategis 2

Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok

Untuk meningkatkan efektifitas perdagangan dalam negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali pada tahun 2019 dapat diukur dari Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Pangan sedangkan tahun 2018 diukur dengan Persentase Peningkatan Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Pokok. Pada tahun 2015-2017 indikator yang digunakan Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Persentase Revitalisasi Pasar Tradisional.

Stabilitas harga dipengaruhi oleh : Terjadinya lonjakan harga pada setiap hari raya, libur Nasional, Tahun Baru karena terkait dengan ketersediaan dan permintaan yang meningkat disebabkan oleh kunjungan wisatawan dan kebutuhan hari raya. Ketika cuaca buruk yang berpotensi terjadinya kekurangan persediaan yang disebabkan karena gagal panen. Hal ini terjadi biasanya terhadap produk hortikultura seperti bawang merah dan cabai, yang terjadi mulai bulan Nopember s.d. Februari. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilaksanakan program peningkatan

efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pasar murah/operasi pasar dengan rincian pada lampiran 1.

Strategi yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok adalah :

1. Peningkatan volume Pasar Murah sampai dengan ke Desa-Desa terutama Desa miskin untuk memberikan akses kebutuhan bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat.
2. Untuk mengantisipasi harga yang bergejolak diperlukan peran Pusat Distribusi Provinsi Bali menjadi Pusat Logistic Provinsi untuk mendampingi peran Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dalam rangka menjaga ketersediaan dan Distribusi. Serta pentingnya tersedia informasi kebutuhan barang pokok dan barang penting antar pulau.
3. Untuk mempermudah/memotong mata rantai Perdagangan dan membentuk harga yang transparan perlu adanya pasar lelang.
4. Peningkatan pemahaman pengelola pasar rakyat/tradisional terhadap peraturan perundangan-undangan dan fasilitasi pemasaran/promosi produk lokal/dalam negeri dalam rangka peningkatan daya saing.

Tabel 3.2
Sasaran Strategis 2
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

Indikator Kinerja	Target Th.2019	Realisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok	<10%	3,31%	3,23%	3,32%	-	3,86%	100%
Persentase Revitalisasi Pasar Tradisional <i>*Target Baru tahun 2015</i>	-	9%	9%	82,08%	-		-
Persentase Peningkatan Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Pokok	-				4,6%		

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran dua adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Persentase Perkembangan harga kebutuhan bahan pokok

Kebutuhan Pokok merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti : dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustria Provinsi Bali pada tahun 2019 menetapkan sasaran strategis Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan data yang di rilis BPS Bali Sampai dengan akhir tahun 2018, secara kumulatif Provinsi Bali mengalami inflasi 3,13%. Di bandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 3,32%. Inflasi Bali terjadi karena beberapa komoditas pangan antara lain bawang merah, beras, cabai rawit dan daging ayam ras. Sedangkan deflasi yang terjadi di beberapa komoditas pangan seperti pepaya, cabai merah, jeruk, kentang, dan bawang putih menahan laju peningkatan inflasi Bali yang lebih tinggi. Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar Sepanjang tahun 2019.

Pada tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali capaian kinerja mencapai 100% dimana Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok 3,86% yang berarti di bawah dari 10%. Walaupun target telah tercapai, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Antisipasi kelangkaan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi dari berbagai gejolak yang terjadi sebagai akibat adanya musim kemarau yang berkepanjangan, dan pola permintaan yang meningkat berkenaan dengan hari hari keagamaan telah dilakukan antisipasi sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi dengan stakeholder di dalam upaya pengendalian inflasi

- Meningkatkan intensitas operasi pasar beras (Bersubsidi) terhadap gejolak harga beras yang terjadi kenaikannya, secara perlahan telah berdampak pada komoditi yang lain
 - Melaksanakan pasar murah menjelang hari-hari keagamaan atau event-event tertentu seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM atau adanya anomali cuaca untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga.
- b. Memfasilitasi peran serta petani/pelaku usaha produk agro dalam kegiatan pasar tani, pasar murah untuk mempermudah akses pemasaran yang sasarannya masyarakat, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya.

3.2.2.2 Persentase Revitalisasi Pasar Tradisional

Dari tahun 2015-2017 indikator kinerja dari meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri adalah Persentase Revitalisasi Pasar Tradisional dan Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok. Dengan dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional baik fisik maupun non fisik, dapat menghapus kesan pasar yang kumuh dan dengan revitalisasi diharapkan kunjungan masyarakat kepasar tradisional mengalami peningkatan. Sehingga terjadi perputaran ekonomi lokal yang baik, maka dengan demikian dapat dijadikan indikasi bahwa terjadinya efisiensi perdagangan dalam negeri.

Pasar tradisional selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yang dimilikinya. Stigma yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilatarbelakangi oleh perilaku dari pedagang pasar, pengunjung atau pembeli dan pengelola pasar. Perilaku

pedagang pasar dan pengunjung atau pembeli yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekalipun memerlukan waktu lama. Keterlibatan pengelola pasar dalam perbaikan perilaku ini adalah suatu keniscayaan.

Melekatnya stigma buruk pada pasar tradisional, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, di antaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang lebih relatif mudah dijangkau (tidak perlu masuk ke dalam pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah ke atas cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja. Maka dari itu dalam rangka mengurangi stigma buruk yang melekat pada pasar tradisional tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Telah melaksanakan pembinaan dan penataan pasar tradisional sebanyak 51 pasar atau sebesar 9 Persen Pasar di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali dari target pembinaan, sampai dengan 2017 sebanyak 106 pasar. Tekait dengan capaian diatas, maka berikut diuraikan pasar tradisional yang telah dilakukan pembinaan dan penataan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pasar Tradisional Yang Telah Dilakukan Pembinaan Dan Penataan Tahun 2017

No	Nama Pasar Tradisional	Kabupaten
1	Pasar Umum Tegallalang	Gianyar
2	Pasar Semebaung	Gianyar
3	Pasar Umum Tampaksiring	Gianyar

No	Nama Pasar Tradisional	Kabupaten
4	Pasar Desa Gunaksa	Klungkung
5	Pasar Desa Dawan Kelod/Peken Dawan	Klungkung
6	Pasar Desa Dawan Kaler/Pasar Tenten	Klungkung
7	Pasar Umum Manggis	Karangasem
8	Pasar Umum Amlapura Barat	Karangasem
9	Pasar Umum Bebandem	Karangasem
10	Pasar Desa Tembuku	Bangli
11	Pasar Metra	Bangli
12	Pasar Desa Peninjoan	Bangli
13	Pasar Anyar Banjar Tengah	Jembrana
14	Pasar Umum Negara	Jembrana
15	Pasar Tegal Cangkring	Jembrana
16	Pasar Desa Adat Mengwi	Badung
17	Pasar Desa Adat Tegal Darmasaba	Badung
18	Pasar Petang	Badung
19	Pasar Buleleng	Buleleng
20	Pasar Mumbul	Buleleng
21	Pasar Sukasada	Buleleng
22	Pasar Tradisional Marga	Tabanan
23	Pasar Induk Sayur Mayur Baturiti	Tabanan
24	Pasar Tradisional Baturiti	Tabanan
25	Pasar Merta Sari Candi Kuning	Tabanan
26	Pasar Batan Kendal	Kota Denpasar

No	Nama Pasar Tradisional	Kabupaten
27	Pasar Desa Pakraman Serangan	Kota Denpasar
28	Pasar Umum Blahbatuh	Gianyar
29	Pasar Umum Payangan	Gianyar
30	Pasar Umum Ubud	Gianyar
31	Pasar Seririt	Buleleng
32	Pasar Rakyat Banjar	Buleleng
33	Unit Pasar Kampung Bugis	Buleleng
34	Pasar Yadnya	Kota Denpasar
35	Pasar Penatih	Kota Denpasar
36	Pasar PKK Desa Pengotan	Bangli
37	Pasar Bulan Palapa/Pasar Desa Landih	Bangli
38	Pasar Desa Kayubihi	Bangli
39	Pasar Desa Pakrama Tihingan	Klungkung
40	Pasar Desa Kayubihi	Klungkung
41	Pasar Desa Paksewali	Klungkung
42	Pasar Umum Karangayar	Karangasem
43	Pasar Umum Telaga	Karangasem
44	Pasar Umum Menanga	Karangasem
45	Pasar Umum Melaya	Jembrana
46	Pasar Desa Pakraman Lelateng	Jembrana
47	Pasar Desa Pakraman Baler Bale Agung	Jembrana
48	Pasar Senganan	Tabanan
49	Pasar Rakyat Penebel	Tabanan
50	Pasar Umum Beringkit	Badung

Selain itu untuk menggambarkan kondisi jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di 9 Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun 2018, maka diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali

No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejaring	Non Jejaring	Berjejaring + Non Jejaring
1	Denpasar	49	120	177	297
2	Badung	57	272	361	633
3	Tabanan	13	27	188	215
4	Jembrana	17	4	22	26
5	Buleleng	86	21	24	45
6	Karangasem	18	15	4	19
7	Klungkung	24	9	11	20
8	Bangli	37	10	20	30
9	Gianyar	70	126	33	159
TOTAL		371	604	817	1.421

Untuk kelancaran distribusi Barang Pokok Penting maka di tahun 2019 dilaksanakan pemahaman kepada distributor melalui rapat kordinasi. Dengan diberikannya pemahaman kepada para distributor melalui rapat koordinasi maka diharapkan distribusi barang pokok penting pada tahun 2019 berjalan lancar .

Berikut data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali Tahun 2018 :

Tabel 3.5
Data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah
1	Denpasar	25
2	Badung	18
3	Tabanan	20
4	Jembrana	35
5	Buleleng	4
6	Karangasem	23
7	Klungkung	22
8	Bangli	27
9	Gianyar	9 (Agen)
TOTAL		183

3.2.3 Sasaran Strategis Ketiga

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Ekspor Daerah Bali

Meningkatnya ekspor daerah Bali pada tahun 2019 dapat diukur dari Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Jumlah Penerbitan SKA(Surat Keterangan Asal) sedangkan indikator kinerja sasaran meningkatnya ekspor Daerah Bali pada tahun 2015-2019 dapat diukur dari Persentase Peningkatan nilai ekspor perdagangan Bali dan Persentase Peningkatan jumlah Eksportir Baru. Dengan meningkatnya nilai ekspor dan meningkatnya jumlah penerbitan SKA serta jumlah eksportir yang meningkat dapat dijadikan indikasi bahwa ekspor daerah Bali meningkat.

Meningkatnya ekspor daerah Bali antara lain disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ekspor meningkat, meningkatnya permintaan dari buyer luar negeri, produk-produk yang diekspor memiliki ciri kas tersendiri yang

berlandaskan seni dan budaya, desain produk sesuai selera pasar, harga bersaing, dan adanya perjanjian bilateral antar negara. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya promosi serta kurangnya kegiatan sosialisasi dan verifikasi eksportir baru, adanya perang dagang, kurangnya kemampuan eksportir memanfaatkan hasil perjanjian, kurangnya inovasi dan kurangnya kemampuan eksportir memahami kebijakan serta kebutuhan pasar.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ekspor antara lain :

1. Promosi untuk menembus peluang pasar internasional dan menjalin kerjasama Provinsi Bali dengan Provinsi Negara Mitra Dagang.
2. Meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam menganalisa pasar dalam mengoptimalkan produksi yang tersedia pada pengusaha/ eksportir.
3. Meningkatkan informasi pasar luar negeri bagi eksportir Bali dan meningkatkan kemampuan eksportir memanfaatkan perdagangan berbasis digital.
4. Meningkatkan ragam desain dalam merebut pasar.
5. Memfasilitasi kerjasama untuk memenuhi pasokan bahan baku kerajinan terutama kayu, perak dan tenun.
6. Meningkatkan Pemahaman pengusaha tentang mekanisme untuk mendaftarkan hasil cipta karyanya.
7. Memfasilitasi akses permodalan dan akses promosi/pemasaran.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa Indikator Kinerja nya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sasaran Strategis 3
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

Indikator Kinerja	Target Th.2019	Realisasi Capaian					Capaian % 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	2,22%				23,54%	-39,85%	-19%
Persentase Peningkatan nilai ekspor perdagangan Bali	-	-4,45%	19,29%	18,34%	-		-
Persentase Peningkatan jumlah Eksportir Baru	-	10%	6,81%	9,84%	-		-

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran tiga adalah sebagai berikut:

3.2.4.1 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda.

Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di Indonesia sebagian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor hasil pertanian dan perikanannya ke luar negeri. Dalam lima tahun terakhir (2014 – 2018) realisasi ekspor daerah Bali berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan mengalami peningkatan rata-rata 13,85% per tahun, dimana pada tahun 2014 nilai ekspor daerah Bali sebesar US\$ 503,826,213.14 dan sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi US\$ 839,550,122.90. Berikut di uraikan perkembangan Ekspor Provinsi Bali dari tahun 2014-2018 :

Tabel 3.7
Perkembangan Ekspor Provinsi Bali Dari Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Realisasi Ekspor (US \$)	Keterangan
1	2014	503,826,213.14	Naik 3,65
2	2015	481,402,783.80	Turun 4,45
3	2016	574,272,194.83	Naik 19,29
4	2017	679,594,478.52	Naik 18,34
5	2018	839,550,122.90	Naik 23,53
Rata – Rata Mengalami Peningkatan			13,85

Kenaikan Ekspor di Bali disebabkan antara lain: pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor, perjanjian dagang antar negara, pelayanan dokumen ekspor/Surat Keterangan Asal yang cepat, harga produk yang bersaing, design produk dan mutu produk sesuai selera pasar, kemampuan pelaku usaha memenuhi permintaan pasar.

Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya dengan menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial untuk dapat dikembangkan menjadi UKM ekspor melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan ekspor-impor, promosi produk unggulan pada pameran, sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri, serta melalui peningkatan kerja sama dengan Asosiasi dan instansi terkait untuk mendorong eksportir baru.

Pada tahun 2015 tercatat 352 eksportir atau naik sebesar 10% dibanding tahun 2014 yang mencapai 320 eksportir. Tahun 2016 jumlah eksportir sebanyak 376 atau meningkat sebesar 6,81%, sementara untuk tahun 2017 jumlah eksportir sebanyak 413 atau meningkat sebesar 9,84%. Pencapaian tersebut tidak luput dari promosi produk unggulan pada pameran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, maka berikut diuraikan promosi produk unggulan pada pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali sampai tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pameran Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Bali

No	Nama Pameraan	Lokasi	Jumlah Perajin Yang di Promosikan
1	Pameran Inacraft	Jakarta	2 Perajin
2	Expo Nusantara TMII	Jakarta	2 Perajin
3	Pameran HUT Dekranasda	Jakarta	3 Perajin
4	Pameran Pesta Kesenian Bali 2017	Bali	2 Perajin
5	Pameran Pembangunan Pulau Bali 2016	Bali	15 Perajin

Pada tahun 2019 Realisasi ekspor daerah Bali berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Ekspor, capaian kinerjanya -19% atau US \$ 504.937.268,72. Terjadinya penurunan nilai ekspor pada tahun 2019 disebabkan oleh terjadinya penurunan yang signifikan pada nilai ekspor ikan yang disebabkan oleh bahan baku ikan yang susah didapatkan dan harga bahan baku ikan yang meningkat. Sedangkan nilai ekspor produksi kerajinan mengalami penurunan sebesar 13% disebabkan antara lain menurunnya permintaan pasar, design yang tidak sesuai selera pasar, harga tidak bisa bersaing, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kemampuan eksportir, memfasilitasi dengan lembaga keuangan dan dituntut inovasi atau kreatifitas dari pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi. Sebagai pendukung ekspor, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang melakukan pengujian komoditi ekspor (kopi, kakao, panili), sampai dengan tahun

2019 telah melakukan kegiatan pengujian mutu barang sertifikasi sebanyak 85 pengujian dari target 56 pengujian .

3.2.4.2 Jumlah Penerbitan SKA

Capaian indikator Jumlah Penerbitan SKA pada tahun 2019 mencapai 98.20%, hal ini disebabkan tidak semua eksportir memanfaatkan fasilitas SKA karena keterbatasan pengetahuan eksportir. Untuk itu diperlukan sosialisasi kebijakan ekspor import bagi pelaku usaha dan aparaturnya melakukan verifikasi lapangan.

3.2.4 Sasaran Strategis Keempat

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum bagi pelaku usaha agar melakukan aktivitas usahanya secara jujur, bertanggung jawab, beretika serta profesional dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Esensi dari UU ini adalah untuk melindungi konsumen, tidak untuk mematikan usaha dari pelaku bisnis justru mempunyai tujuan untuk membangun usaha yang sehat, menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, melalui penyediaan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu bersaing di dunia usaha.

Meningkatnya perlindungan konsumen tahun 2019 dapat diukur dari Indeks Keberdayaan Konsumen. Sedangkan tahun 2014-2017 indikator kinerja dapat diukur dari Persentase produk ber SNI yang beredar yang diawasi. Tercapainya

perlindungan konsumen tidak terlepas dari telah dilaksanakan program perlindungan konsumen.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Sasaran Strategis 4
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

Indikator Kinerja	Target Th.2019	Ralisasi Capaian					Capaian % 2019
		2015	2016	2017	2018		
Indeks Keberdayaan Konsumen	2%					2%	100%
Persentase produk ber SNI yang beredar yang diawasi	-	7,64%	6.44%	9.16%	-		-
Persentase Peningkatan Produk ber SNI yang beredar yang diawasi		-	-	-	12%		

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran empat adalah sebagai berikut:

3.2.3.1 Indeks Keberdayaan Konsumen

Indeks Keberdayaan Konsumen adalah

Capaian kinerja indeks keberdayaan konsumen 100%, hal ini dipengaruhi antara lain: konsumen cerdas, secara kontinyu melakukan pengawasan terhadap barang beredar, tumbuhnya kesadaran pelaku usaha pentingnya legalitas usaha sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab serta terselesaikannya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha diluar pengadilan. Keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari strategi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan perindustrian Provinsi Bali diantaranya:

1. Menciptakan konsumen cerdas melalui edukasi konsumen
2. Melakukan pengawasan barang beredar, utamanya produk-produk ber-SNI. Produk yang diawasi: mainan anak-anak, pakaian bayi, melamin peralatan makanan dan minuman, air minum dalam kemasan, kompor gas, pompa air listrik seklar, kabel listrik, penanak nasi, Lampu Hemat Energi (LHE)
3. Membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan merekrut calon-calon anggota BPSK. Penyelesaian pengaduan konsumen tahun 2019 baru sampai tahap mediasi karena BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) belum terbentuk. Jenis pengaduan yang dimediasi yaitu : pinjaman online, teguran/somasi kepada Trans Studio Mall, Pialang/PT. Solid Berjangka, pemesanan penginapan di Breezy Hotel, tidak puas dengan pelayanan Salon Anggita di Seminyak.
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah label yang menandakan barang tersebut sesuai dengan standar produk yang ada di Indonesia. Dengan adanya label SNI ini masyarakat bisa mengetahui barang mana yang layak dipakai dan tidak layak. Label SNI ini bisa masyarakat temukan pada macam-macam barang yang biasa kita temui. Diantaranya adalah pada mainan anak, helm, peralatan elektronik, ACCU, Pompa Air Listrik, Semen, Kabel dan sebagainya. Dengan demikian pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali melakukan pengawasan terhadap sebanyak 12 Produk SNI di Provinsi Bali yang diawasi dari

jumlah produk SNI yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) sebanyak 131 Produk, atau sebesar 9,93 persen, ini sesuai dengan target pada sasaran strategis ke empat, indikator kinerja pertama, yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali yaitu sebesar 12% persen di tahun 2018. Tekait dengan capaian diatas, maka berikut diuraikan produk SNI yang telah dilakukan pengawasan, sebagai berikut :

Tabel 3.10
Produk SNI Yang Telah Dilakukan Pengawasan

No	Jenis Produk SNI yang di Awasi	Jumlah Pengawasan Pada Tahun 2019
1	Kabel Listrik	5 Pengawasan
2	Kloset Duduk	7 Pengawasan
3	Pompa Air Listrik	2 Pengawasan
4	Lampu Swaballast (LHE)	5 Pengawasan
5	Tepung Terigu	7 Pengawasan
6	Semen	2 Pengawasan
7	Kotak Kontak	8 Pengawasan
8	Ban Luar Sepeda Motor	12 Pengawasan
9	Accu	3 Pengawasan
10	Helm	4 Pengawasan
11	Piring Melamin	2 Pengawasan
12	Tangki Air	1 Pengawasan
13	AMDK	6 Pengawasan
14	Regulator	2 Pengawasan
15	Mainan Anak	8 Pengawasan
16	Bahan Berbahaya (B2)	24 Pengawasan
Jumlah		98 Pengawasan

Disamping itu pada tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Juga melakukan pengawasan terhadap Barang yang beredar yang dilengkapi dengan dengan Manual Kartu Garansi sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pengawasan terhadap Barang yang beredar yang dilengkapi
dengan Manual Kartu Garansi

No	Jenis Produk Manual Kartu Garansi yang Diawasi	Jumlah Pengawasan Pada Tahun 2018
1	Kompor Gas	3 Pengawasan
2	Kipas Angin	3 Pengawasan
3	Setrika Listrik	1 Pengawasan
4	P. Nasi Serbaguna/ Magic Com	3 Pengawasan
Jumlah		16 Pengawasan

Capaian indikator Persentase peningkatan produk ber SNI yang beredar yang diawasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung (terlampir). Walaupun telah mencapai target program pengawasan tetap harus dilakukan bahkan lebih ditingkatkan karena pengawasan harus dilakukan secara *continue*. Sehingga konsumen terlindungi dari penggunaan produk yang tidak bermutu dan produsen akan memproduksi produk sesuai standar dan pedagang akan menjual produk yang bermutu.

3.2.5 Sasaran Strategis Kelima

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan

Saat ini perkembangan bisnis Consumer Good atau pangan tumbuh luar biasa, salah satunya produk usaha makanan dan minuman. Namun masih sedikit yang mampu menembus pasar global karena terganjal pada kemasan yang kurang menarik. Masih rendahnya wawasan pelaku IKM terhadap kemasan sebagai salah satu daya tarik produk, teknologi pengemasan, ketakutan akan mahal biaya pembuatan kemasan, serta masih rendahnya pemahaman bagaimana mendapatkan kemasan yang menarik dengan harga yang terjangkau.

Kegiatan sosialisasi tentang kemasan produk pangan serta kegiatan pendampingan kemasan sehingga para pelaku IKM khususnya industri olahan pangan mendapatkan edukasi tentang pentingnya mutu kemasan yang mencakup 5 fungsi, yaitu: fungsi protektif, praktis, informasi, komunikasi dan ramah lingkungan serta aman dari segi kesehatan. Suatu produk terutama hasil industri olahan pangan dapat dikatakan sudah memiliki kemasan yang sesuai standar, minimal harus memenuhi beberapa syarat seperti :

- Memiliki Brand nama/logo merek dagang, merupakan nama dagang dari perusahaan
- Nama produk, yaitu nama yang diberikan kepada produk yang diproduksi
- Jenis produk yang dipasarkan
- Berat netto produk

- PIRT(Pangan Industri Rumah Tangga), berupa perijinan, yaitu nomor sertifikat izin yang menyertakan bahwa produk telah lulus uji klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Penjelasan singkat tentang keunggulan produk
- Expire date, yaitu tanggal batas kadaluarsa produk
- Barcode, yaitu sistem registrasi komputerisasi batang
- Komposisi, yaitu kandungan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk
- Kandungan gizi produk
- Alamat dan keterangan produsen, yang berguna apabila ada keluhan dari konsumen
- Logo halal, yaitu tanda sertifikat bahwa produk dapat dikonsumsi oleh umat muslim.

Meningkatnya komoditi olahan pangan tahun 2019 dapat diukur dari jumlah industri olahan pangan yang tumbuh dan berkembang. Tercapainya peningkatan komoditi olahan pangan tidak terlepas dari telah dilaksanakan program peningkatan komoditi olahan pangan.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kelima dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Sasaran Strategis 5
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

Indikator Kinerja	Target Th.2019	Ralisasi Capaian					Capaian 2019
		2015	2016	2017	2018		
Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang Tumbuh dan Berkembang	5	-	-	-	-	5	100%

Analisa atas capaian indikator sasaran kelima adalah sebagai berikut:

3.2.5.1 Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang Tumbuh dan Berkembang

Untuk mengembangkan industri olahan pangan, maka terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali yaitu sosialisasi tentang kemasan produk pangan serta kegiatan pendampingan Industri Olahan Pangan agar aman dari segi kesehatan, kandungan bahan baku yang digunakan harus aman konsumsi, serta kemasan produk harus mencantumkan PIRT. Setelah dilaksanakannya sosialisasi, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan secara langsung kepada para pelaku industri olahan pangan yang sudah mengikuti pelatihan dengan tujuan agar adanya peningkatan mutu yang dimiliki. Serta yang tidak kalah penting adalah fasilitasi proses pendaftaran merek dagang HKI melalui quota klinik HKI Kemenperin. Berikut data pelaku usaha industri yang telah difasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui quota klinik HKI Kemenperin

Tabel 3.13

Data Pelaku Usaha Industri yang Telah di Fasilitas dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui quota klinik HKI Kemenperin

NO	NAMA	JENIS USAHA	MEREK	ALAMAT	STATUS
1	Ni Nyoman Suryani	Manisan Buah	Cita Rasa	Badung	Ditolak
2	I Made Budiasa	Manisan Buah	Max Chicken	Denpasar	Ditolak
3	I Wayan Nursidi	Minyak serba guna	Taru Urip	Gianyar	Diproses
4	Luh Irma Susanthi	Bumbu	Irma Bumbu Bali	Buleleng	Ditolak
5	I.B. Jelantik Artanawa	Komik Lontar	Komik Lontar	Karangasem	Diproses
6	Gede Sinar	Kopi	Sari Coffee	Buleleng	Ditolak
7	I Nyoman Nita	Kripik	Nikita Kripik	Badung	Ditolak
8	Ni Putu Krishna Udayani	Kshoe	Kshoe	Gianyar	Ditolak
9	Ni Luh Ida Eka Sucita Ningsih	BeeMyCandle	BeeMyCandle	Buleleng	Diproses
10	Ketut Sudisma	Kopi	Kopitem Sekumpul	Buleleng	Diproses

Tantangan kedepan yang dihadapi antara lain : perlunya inovasi yang tinggi agar produk yang dikembangkan dapat bersaing, peningkatan kualitas SDM dalam teknik produksi, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam produksi dan pemasaran, memiliki merek (HKI), dan melakukan peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing dengan produk impor.

3.3 Aspek Keuangan

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali didukung dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Rp.19.046.176.095,00 dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 14.704.661.072 (77,20%) realisasi fisik 100% dari target 100%, sisa anggaran Rp.4.341.515.023,00 dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung dengan dana sebesar Rp.11.834.258.765,00 realisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar Rp.11.346.945.859,00 (95,88 %), realisasi fisik 100% dari target 100%.
2. Belanja Langsung anggaran sebesar Rp.7.211.917.330,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 5.837.713.018,00 (80,94%) realisasi fisik 100% dari target 100%.

Rincian anggaran dan pendapatan tahun 2019 seperti tabel dibawah:

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
A	Pendapatan	26.000.000,00	38.300.000,00	147,30
1.	Pendapatan Asli Daerah	26.000.000,00	38.300.000,00	147,30
B	Belanja Daerah	19.046.176.095,00	14.704.661.072	77,20
1.	Belanja Tidak Langsung	11.834.258.765,00	11.346.945.859,00	95,88
2.	Belanja Langsung	7.211.917.330,00	5.837.713.018,00	80,94

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke pertama dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis ke 5 (lima) sasaran, terdapat enam indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2019, 5 (lima) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100%.
2. Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas Industri, dengan indikatornya : Indeks Peningkatan Produksi, capaian kinerja sampai dengan Desember 2019 adalah 3,5 % atau sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target.
3. Sasaran 2 : Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok dengan indikator kinerja : Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok. Capaian kinerja sampai dengan Desember 2019 adalah 3,86 % atau sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target.
4. Sasaran 3 : Meningkatnya Ekspor, dengan dengan indikatornya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Jumlah Barang yang Tersertifikasi. Capaian

kinerja diproyeksikan sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah - 39,85% dengan nilai ekspor US\$ 504.937.268,72 atau capaian kinerja menurun 19%. Sedangkan capaian kinerja sertifikasi mutu barang mencapai 151,78% jika dibandingkan dengan target.

5. Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, dengan indikator kinerja: Indeks Keberdayaan Konsumen. Capaian kinerja sampai dengan Desember 2019 adalah 2% atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target.
6. Sasaran 5 : Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan, dengan indikator kinerja: Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang Tumbuh dan Berkembang. Capaian kinerja sampai dengan Desember 2019 adalah 5 produk olahan atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan dalam rencana aksi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan jaringan bisnis dan pemasaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha.
2. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* yaitu Pemerintah, masyarakat/ pelaku usaha/ asosiasi, dan akademisi.

3. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Utama

4.

Sasaran/Capaian Program				Tingkat Capaian	Program	Kegiatan					Keterangan
Uraian		Indikator				Uraian		Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1		2		3	4	5		6	7	8	9
A	Meningkatkannya Produktifitas Industri	-	Indeks Peningkatan Produksi	3.5%	a Program Pemantapan dan Peningkatan Industri	1	Pengembangan Produk Industri Unggulan	- Jumlah Pameran yang diikuti	Pengrajin	121, 45	
						2	Pameran pada Pesta Kesenian Bali (PKB)	- Jumlah Perajin yang mengikuti pameran PKB	Perajin	215	
						3	Pendataan Industri di Bali	- Jumlah Buku Data Industri Bali	Buku	10	
						4	Temu Bisnis Produk Industri	- Jumlah Temu Bisnis yang Dilaksanakan	Kali	2	
						5	Pembinaan Pengawasan Industri Pangan	- Jumlah Industri Pangan yang Dibina dan Diawasi	Industri	35	
B	Terjaganya Harga Kebutuhan Bahan Pokok	-	Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok	3.86%	b Program Peningkatan efisiensi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6	Pasar Murah/ Operasi Pasar	Jumlah Pasar Murah Pertama	Kali	11	

Sasaran/Capaian Program				Tingkat Capaian	Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian		Indikator				Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1		2		3	4	5	6	7	8	9
						7 Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pelaku Usaha	Jumlah Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Gedung yang Dibina	Orang	50	
						8 Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang Difasilitasi Pameran	Kali	1	
C	Meningkatnya Ekspor	-	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	2%	c Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	9 Pemasaran Produk Unggulan Daerah Bali	Jumlah Pelaksanaan Promosi	Jenis	14	
						10 Pengendalian Impor	Jumlah Pengawasan Terhadap Importir	Importir	100	
						11 Peningkatan Pelayanan Surat Keterangan Asal	Jumlah Pengawasan Terhadap Eksportir	Eksportir	531	

Sasaran/Capaian Program				Tingkat Capaian	Program	Kegiatan					Keterangan
Uraian		Indikator				Uraian		Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1		2		3	4	5		6	7	8	9
			Jumlah Barang yang Tersertifikasi	56	d Program Pengembangan Laboratorium Penguji Mutu Barang	12	Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen	Jumlah Ruang Lingkup Komoditi yang di Akreditasi	Komoditi	3	
D	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen	-	Indeks Keberdayaan Konsumen	2%	d Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	13	Peningkatan Penerapan Tertib Niaga	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi dan Dibina	Pelaku Usaha	30	
						14	Peningkatan Pengawasan Terhadap Barang yang Beredar	Jumlah Produk Ber SNI yang Diawasi	Produk ber SNI	14	
						15	Penguatan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Dimediasi	Orang	15	
E	Meningkatnya Komoditi Olahan Pangan		Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang Tumbuh dan Berkembang	5	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	16	Peningkatan Mutu Industri Olahan Pangan	Jumlah Industri Olahan Pangan yang Mendapatkan Pendampingan	IKM	40	

Sasaran/Capaian Program				Tingkat Capaian	Program	Kegiatan					Keterangan
Uraian		Indikator				Uraian		Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1		2		3	4	5		6	7	8	9
F	Program Pendukung	-	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani	100%	e Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang di sediakan	Lembar	200	
						18	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	3	
						19	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Keberihan Kantor	Paket	1	
						20	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Jenis	61	
						21	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	Jenis, Tahun, Lembar	8, 1, 63.800	
						22	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	Jenis	5	
						23	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang di sediakan	Jenis	4	
						24	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang di pesan	Kotak	1700	
						25	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jenis Perjalanan Dinas	2	

Sasaran/Capaian Program				Tingkat Capaian	Program	Kegiatan				Keterangan	
Uraian		Indikator				Uraian		Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target
1		2		3	4	5		6	7	8	9
		-	Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	100%	f Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26 Upacara Keagamaan	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang dilaksanakan	Jenis		6	
						28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang di pelihara	Paket		1	
						21 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihatara	Unit		15	
						22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit		48	
						23 Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir	Jumlah taman dan tempat parkir yang di pelihara	Luas tanan dan tempat parkir		4200m2	
		-	Jumlah laporan keuangan	30 Laporan	g Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	24 Penyusunan,perencanaan, dan pelaporan	Jenis laporan yang terselesaikan	Laporan		6	